BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dan departemen-departemen dibawahnya dengan tujuan sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia yang semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap nasib suatu daerahnya (Dewi, 2023).

Pada faktanya oranisasi publik dimata masyarakat ini adalah organisasi yang pada pelaksanaan perkerjaannya kurang maksimal, kurangnya produktifitas, kualitas pada kinerja yang rendah, dan juga terdapat inefisiensi pada dana yang digunakan. Aktibatnya masyarakat menuntut sebuah keterbukaan yang bersih atas kinerja dalam organisasi sector publik ini yang dimana sesuai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar untuk reformasi kelembagaan dalam menghasilkan good government, ialah sesuatu pemerintahan yang transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan (Meitharina, 2023).

Akuntabilitas didalam keuangan daerah adalah proses dari pengelolaan dalam keuagan daerah dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang nantinya dapat dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada pihak pihak yang terkait dan juga masyarakat dengan hasil yang trasnparan baik keberhasilan maupun hambatan, dan hasil tersbut dapa dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya (Meitharina, 2023). Peran masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban ini bukan hanya untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban dari pengeolaan keuangan daerah tersebut melainkan

masyarakat disini juga dapat berperan untuk menuntut atas pertanggungjawaban pengoprasian dan juga pelaksanaan mengenai penggunakaan dana tersebut.

Laporan pertanggungjawaban adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh para pemerintah daerah terhadap apa saja rencana-rencana yang sudah berlangsung dalam rangka pensejahteraan rakyat yang dimana pelaporanini harus dilakukan secara terbuka dan juga terjamin ketransparanannya. Laporan pertanggungjawaban ini juga dapa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk organisasi public terkait yang dimana dapat dijadikan sebuah acuan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi kedepan.

Pengelolaan keuangan yang efisien merupakan fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisaasi kedepan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah sebagai pengelola anggaran publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah keterbatasan sumber daya yang tersedia, efisiensi dalam pengelolaan keuangan menjadi semakin penting untuk memaksimalkan manfaat dari setiap pengeluaran yang dilakukan.

Keuangan mejadi sebuah faktor penting yang ada didalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan kurang maksimalnya fungsi para pemerintah daerah tanpa biaya yang memadai dalam rangka memberikan sebuah pelayanan yag berjalan dengan optimal bagi masyarakat dalam hal pembangunan. Untuk mengetahui kinerja dari organisasi pemerintah daerah maka diperlukan pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan mengukur kinerja organisasi tersebut dengan melihat laporan keungannya. Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat apakah penyerapan anggaran berjalan secara efektif atau tidak (Rustanti & Sudharma, 2022). Maka dari itu pemerintah daerah memiliki keharusan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dapat diketahui kapabilitas yang dimiliki oleh pemerintah tersebut dalam pengaturan dan juga pengurusan daerahnya masing-masing. Maka dengan terjadinya hal tersebut diperlukan suatu perancangan untuk pelaksanaan keuangan daerah tersebut demi terselenggara dengan baik program tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini merupakan salah satu peran dari instasi pemerintah daerah yakni Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM). Disperindagkop memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UKM. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah.

Salah satu daerah di Provinsi Gorontalo memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya dalam pengembangan sektor UKM dan koperasi adalah Kabupaten Pohuwato. Namun, pengelolaan keuangan pada sektor ini sering kali menghadapi berbagai kendala, hal ini sebagaimana dapat dilihat dari data berikut

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato Tahun 2022-2024

Realisasi Anggaran Tahun 2022			
Belanja Operasi	7.051.074.956	6.967.259.276,00	98,81
Belanja Barang Dan Jasa	3.961.064.163	3.922.308.535,00	99,02
Belanja Modal	23.790.797	23.790.797,00	100
Surplus/Defisit	**-6.333.105.753**	**-6.272.100.595,20**	**99,04**
Realisasi Anggaran Tahun 2023			
Uraian	**Anggaran 2023**	**Realisasi 2023**	**Persentase (%)**
Belanja Daerah	11.997.476.126,00	7.553.552.038,00	62,95
Belanja Operasi	11.745.368.726,00	7.311.147.688,00	63,71
Belanja Barang Dan Jasa	8.706.312.502,00	4.851.517.559,00	55,72
Belanja Modal	252.107.400,00	242.404.350,00	96,15
Surplus/Defisit	**-11.255.716.126,00**	**-7.112.709.038,00**	**63,19**
Realisasi Anggaran Tahun 2024			
Uraian	**Anggaran 2024**	**Realisasi 2024**	**Persentase (%)**
Belanja Daerah	6.304.815.444	5.811.118.858,00	92,17
Belanja Operasi	6.082.825.394	5.611.778.908,00	92,26
Belanja Barang Dan Jasa	2.995.938.228	2.727.551.271,00	91,04
Belanja Modal	221.990.050	199.339.950,00	89,8
Surplus/Defisit	**-5.538.055.444**	**-5.376.096.858,00**	**97,08**

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato (2025)

Berdasarkan data realisasi anggaran diatas, terlihat adanya ketidakseimbangan dalam pemanfaatan anggaran, seperti penurunan signifikan realisasi anggaran pada tahun 2023 dan peningkatan kembali di tahun 2024.

Penurunan ini berpotensi mengurangi manfaat ekonomi jika alokasi anggaran tidak dioptimalkan.

Selanjutnya hasil observasi awal dengan pengelola program dan laporan/operator Sirup dan E-Monev, berdasarkan data e-monev pada tahun 2024 Disperindagkop Kabupaten Pohuwato, bahwa dari 7 belanja program yakni program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pengawasan pemeriksaan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah,usaha kecil,dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan umkm, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program perencanaan dan pembangunan industri. Terdapat 4 program yang anggarannya tidak terealisasi secara optimal. Presentase pencapaian anggaran yang kurang optimal tersebut tercermin dalam beberapa sub kegiatan dari setiap program, seperti Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dengan realisasi hanya sebesar 7,57%, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor sebesar 49,45%, Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar 66,88%, dan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan sebesar 69,23%. Rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya hambatan dalam proses pelaksanaan, baik dari sisi perencanaan yang kurang matang, koordinasi antar instansi, maupun kendala teknis lainnya. Selain itu, realisasi anggaran yang jauh di bawah target ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan program, terutama yang berkaitan dengan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika ditinjau lebih mendalam, rendahnya realisasi pada kegiatan tertentu dapat berdampak negatif terhadap efektivitas program secara keseluruhan. Sebagai contoh, program pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang hanya mencapai 49,45% dapat memengaruhi kualitas fasilitas kerja pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan yang hanya terealisasi 69,23%, hal ini menunjukkan bahwa upaya mendukung pelaku usaha mikro untuk naik kelas masih belum optimal, yang dapat menghambat perkembangan sektor UMKM di Kabupaten Pohuwato. Rendahnya realisasi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program belum berjalan secara efisien. Selain itu, tingkat realisasi yang rendah juga dapat mengindikasikan adanya potensi kendala, baik dari segi teknis, administratif,

maupun kelembagaan. Dampaknya, tujuan program yang seharusnya memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat menjadi sulit tercapai. Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, kondisi ini menjadi sinyal penting untuk meninjau kembali mekanisme pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan prinsip efisiensi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 /PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan "bahwa nilai kinerja penyerapan anggaran paling sedikit 90% untuk dapat dikategorikan baik". Sedangkan berdasarkan data realisasi anggaran diatas, persentase penyerapan anggaran di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato khusus belanja modal tahun 2024 belum mencapai realisasi, karena berada dibawah 90%. Begitupun dengan data e-monev untuk belanja program dan kegiatan yang belum mencapai realisasi, karena berada dibawah 90%.

Pendekatan Analisis Biaya-Manfaat (Cost Benefit Analysis - CBA) relevan dalam mengkaji efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato karena metode ini memungkinkan evaluasi antara pengeluaran biaya dan perolehan manfaat yang diperoleh dari realisasi anggaran. Melalui pendekatan CBA, penelitian ini dapat mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran dalam memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta memastikan biaya yang dikeluarkan seimbang dengan hasil yang diperoleh, sehingga kebijakan pengelolaan anggaran di masa depan dapat lebih efisien dan tepat sasaran. Penelitian yang menggunakan pendekatan *Cost Benefit Analysis* sejalan dengan nilai-nilai ini, karena metode tersebut mengevaluasi sejauh mana program-program yang dijalankan memberikan manfaat yang adil dan signifikan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan pendekatan *Cost Benefit Analysis* (CBA) untuk menganalisis investasi yang telah dilakukan apakah menguntungkan atau merugikan dan untuk menentukan kelayakan suatu program sebelum berinvestasi. CBA sendiri merupakan suatu pendekatan sistematis yang mempertimbangkan antara biaya (*cost*) yang dikeluarkan dan manfaat/keuntungan (*benefit*) yang akan dihasilkan serta kelayakan suatu proyek.

Pendekatan *Cost-Benefit Analysis* (CBA) dapat diterapkan sebagai alat guna mengevaluasi sejauh mana program-program yang dijalankan oleh Disperindagkop dan UKM mampu memberikan manfaat yang seimbang atau bahkan melebihi biaya yang dikeluarkan (Wiratama, 2020). Pendekatan ini sangat relevan, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih selektif dan strategis dalam pengelolaan keuangannya.

Selain itu, dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah perlu menunjukkan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan menghasilkan dampak nyata. Efisiensi tidak hanya terkait dengan penghematan biaya, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh masyarakat lebih besar daripada sumber daya yang digunakan.

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ ۞ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha melihat.” (Q.S An-Nisa’:58)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat dengan penelitian tentang efisiensi pengelolaan keuangan pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato. Amanat dalam konteks pengelolaan keuangan publik merujuk pada tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah untuk menggunakan anggaran dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyerahan amanat kepada yang berhak berarti memastikan bahwa alokasi dana tepat sasaran, memberikan manfaat maksimal, dan menghindari pemborosan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan keuangan pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato dengan pendekatan *Cost-Benefit Analysis*. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi program-program yang efektif dan efisien serta memberikan

rekomendasi strategis untuk pengelolaan anggaran yang lebih optimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato Dengan Pendekatan *Cost Benefit Analysis*"

1.2. Identifikasi Masalah

1. Terdapat fluktuasi signifikan dalam realisasi anggaran dari tahun ke tahun, khususnya pada tahun 2023 yang mengalami penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya.
2. Beberapa program dan kegiatan tidak terealisasi secara optimal khusunya program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan 69,23%
3. Beberapa komponen belanja, khususnya belanja modal dan program-program strategis lainnya, masih berada di bawah angka 90%
4. Belum adanya evaluasi ataupun survei masyarakat terkait program dan bantuan yang telah di salurkan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Analisis efisiensi pengelolaan keuangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Pohuwato.
2. Menggunakan pendekatan *Cost Benefit Analysis* (CBA) untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan keuangan dalam rentang waktu 2022–2024.
3. Fokus pada evaluasi efisiensi alokasi dan pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efisiensi pengelolaan keuangan pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato selama periode 2022–2024?

2. Apakah alokasi dan pemanfaatan anggaran yang dilakukan telah memberikan manfaat nyata yang seimbang atau melebihi biaya yang dikeluarkan?
3. Apa saja rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di masa depan?

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkarya wawasan dan literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait efisiensi pengelolaan keuangan dengan pendekatan *cost benefit* analysis. Penelitian ini juga dapat menjadi refensi bagi studi lanjutan yang bertujuan meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Penelitian ini dapat menjadi bahan ajar dan sumber pembelajaran bagi mahasiswa serta menambah referensi bagi pengembangan penelitian di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan pemerintah.

2. Bagi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap efisien pengelolaan keuangan dengan pendekatan *cost benefit analysis*, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi penggunaan anggaran. Selain itu, penelitian ini turut mendorong dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UKM di Kabupaten Pohuwato, melalui peningkatan efisiensi program-program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh Disperindagkop dan UKM. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peluang usaha baru yang mendukung penguatan ekonomi lokal.

1.6. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efisiensi pengelolaan keuangan pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato menggunakan pendekatan *Cost-Benefit Analysis* (CBA).

2. Mengidentifikasi program-program yang efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah.
3. Memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan pengelolaan keuangan yang lebih optimal dan tepat sasaran.